



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NASRUDIN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
3. NHK : 980276

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 530.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 872 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 215 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 9.500.000

1. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, WARISAN Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 272.700.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 32.000.000

Sub Total Rp. 844.200.000

III. HUTANG Rp. 53.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 791.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.